

TRANSFORMASI DIGITAL DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

Digyo

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Subang

digyotegl@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital menjadi kebutuhan strategis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, serta transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transformasi digital di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dengan menggunakan pendekatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai indikator utama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transformasi digital pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang telah berjalan baik hal ini bisa dilihat dari hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dengan nilai **3,38** atau predikat **BAIK**. Dari 8 aspek yang menjadi ukuran dalam evaluasi SPBE 1 aspek sudah berada pada Tingkat kematangan level 4 yaitu Layanan Publik Berbasis Elektronik, 5 aspek pada tingkan kematangan level 3 yaitu Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE, dan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, 1 aspek pada tangka kematangan level 2 yaitu Penerapan Manajemen SPBE, serta 1 aspek pada tingkat kematangan level 1 Audit TIK.

Kata Kunci: Transformasi Digital, SPBE, eGovernment

Abstract

*Digital transformation has become a strategic necessity for the Subang Regency government to improve the quality of public services, bureaucratic efficiency, and transparency and accountability in government administration. This study aims to analyze the implementation of digital transformation in the Subang Regency government using the Electronic-Based Government System (SPBE) approach as the main indicator. The research method used is descriptive research with a qualitative approach, with data collection techniques through literature and documentation studies. The results indicate that digital transformation in the Subang Regency Government has been progressing well, as evidenced by the 2024 SPBE evaluation, which scored 3.38, or a **GOOD** predicate. Of the eight aspects measured in the SPBE evaluation, one aspect is at maturity level 4, namely Electronic-Based Public Services; five aspects are at maturity level 3, namely Internal SPBE Governance Policy, SPBE Strategic Planning, Information and Communication Technology, ESBS Organizers, and Electronic-Based Government Administration Services; one aspect is at maturity level 2, namely SPBE Management Implementation; and one aspect is at maturity level 1, namely ICT Audit.*

Keywords: Digital Transformation, SPBE, eGovernment

PENDAHULUAN

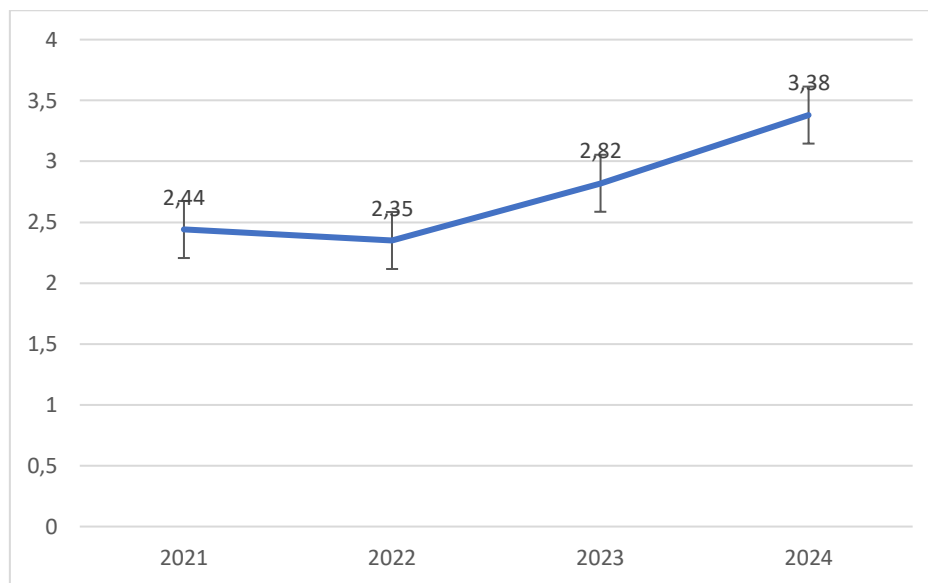
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang begitu cepat di era globalisasi menimbulkan sebuah fenomena dimana negara-negara di dunia mulai mengharapkan terjadinya interaksi antar masyarakat jauh lebih efisien dan efektif demikian juga yang terjadi di Indonesia. Pemerintah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan era digital guna meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, serta transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Transformasi digital menjadi suatu kebutuhan strategis, bukan lagi sekadar pilihan, dalam menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin dinamis dan berbasis teknologi. (Prawira et al., 2023)

Salah kebijakan pemerintah untuk menghadapi hal tersebut yaitu peraturan presiden nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Melalui penerapan SPBE memberikan peluang bagi pemerintah dalam mendorong dan merealisasikan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. SPBE tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup aspek tata kelola, manajemen, serta integrasi layanan pemerintahan.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Subang menerbitkan Peraturan Bupati nomor 120 tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan Bupati ini juga merupakan bagian dari implemementasi salah satu misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019 – 2023 yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, terbuka, serta pelayan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan misi tersebut arah kebijakan yang diambil pemda Kabupaten subang antara lain yaitu memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasiskan teknologi informasi.

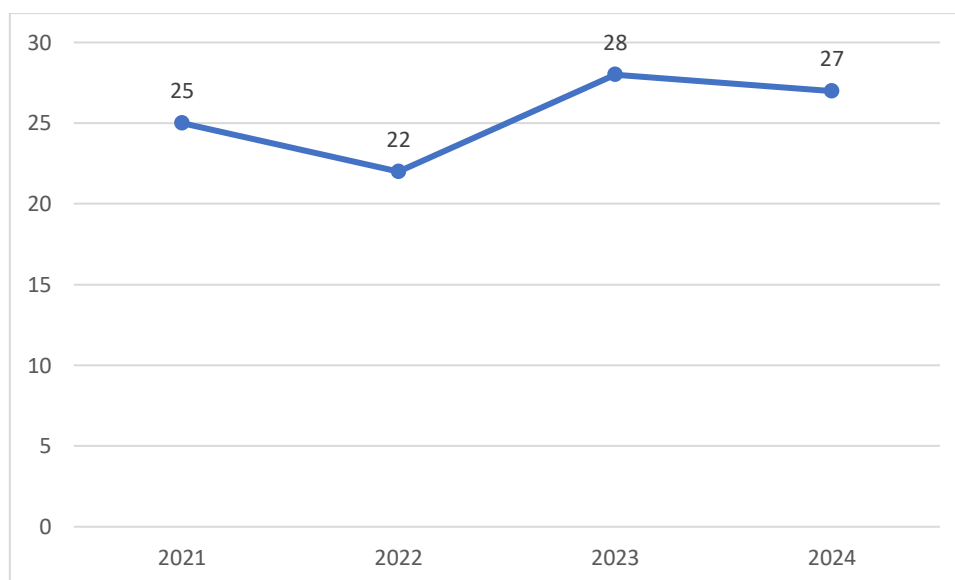
Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Evaluasi ini menjadi alat ukur tingkat kematangan digital suatu instansi berdasarkan 4 domain, yaitu kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE. Dengan adanya indikator ini, pemerintah daerah dapat mengetahui posisi dan capaian transformasi digital yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil evaluasi setelah perubahan jumlah indikator evaluasi dari 37 menjadi 47, penerepan SPBE di kabupaten Subang pada tahun 2024 sudah dalam kategori **Baik**. Hasil Evaluasi Kabupaten Subang dari tahun 2021 sampai tahun 2024 dapat dilihat dari gambar berikut : (Menpan RB (a), 2021, 2022, 2023, 2024)



Gambar 1
Indeks SPBE Kabupaten Subang tahun 2021 -2024

Berdasarkan gambar di atas secara keseluruhan indeks Kabupaten Subang mengalami kenaikan yang cukup signifikan , tetapi dari posisi peringkat dari 28 kabupaten/Kota di Jawa Barat peringkat Kabupaten Subang selalu berada di peringkat bawah, hal dapat dilihat dari gambar berikut :



Gambar 2
Peringkat Indeks SPBE Kabupaten Subang di Jawa Barat
tahun 2021-2024

Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang menganalisis transformasi digital di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dengan menggunakan indikator SPBE sebagai alat ukur. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek yang sudah dan belum

optimal di Kabupaten Subang dalam rangka meningkatkan kualitas transformasi digital di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dapat berjalan secara optimal dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

KAJIAN TEORI

ADOPSI TEKNOLOGI INFORMASI

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berlangsung dengan cepat, memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia seperti bisnis, pendidikan, dan masyarakat pada umumnya. Perkembangan ini berdampak besar pada cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Disamping memberikan peluang baru, TIK juga memunculkan tantangan terkait privasi, keamanan, dan dampak sosial. Oleh Karena itu penting untuk terus memantau perkembangan TIK dan memastikan penerapannya atau adopsi teknologi dapat berkelanjutan.

Hall dan Kahn menjelaskan bahwa adopsi teknologi adalah suatu proses seleksi untuk mengadopsi dan memakai suatu temuan atau inovasi baru (Arifin, 2017). Menurut Straubb, adopsi bukan hanya pilihan untuk menerima teknologi atau inovasi baru namun juga sejauh mana teknologi diintegrasikan ke dalam konteks yang sesuai. (Arifin, 2017)

Menurut Taylor and Todd's studi tentang penentu adopsi teknologi dapat dibedakan menjadi tiga mazhab; pertama, studi berbasis model *intention-based* yang berfokus kepada bagaimana pengguna menerima atau tidak dan kemudian menggunakan atau menolak suatu teknologi; kedua, difusi inovasi yang fokus kepada mengapa dan bagaimana suatu teknologi menyebar keseluruh organisasi atau komunitas; ketiga, bagaimana teknologi baru mempengaruhi tujuan, target dan kinerja organisasi. (Arifin, 2017; Kencono et al., 2024)

TRANSFORMASI DIGITAL

Transformasi digital telah menjadi istilah yang semakin umum dalam dunia bisnis modern, mencerminkan evolusi mendalam dalam cara organisasi beroperasi. Dengan mengadopsi teknologi digital, sebuah organisasi tidak hanya memperbarui infrastruktur teknologinya, tetapi juga mengubah struktur organisasinya, budayanya, dan cara berinteraksi dengan pelanggan. Sebagaimana disorot dalam penelitian oleh Westerman *et al.*, transformasi digital melibatkan penerapan teknologi digital untuk merombak model bisnis, proses operasional, dan pengalaman pelanggan. (Anggoro et al., 2024)

Transformasi digital merupakan sebuah proses yang luar biasa yang memanfaatkan sumber daya yang ada dan teknologi digital saat ini untuk memberikan pengalaman baru kepada luar organisasi. Transformasi digital dapat digambarkan sebagai sebuah alur pemanfaatan teknologi digital yang berfokus pada teknologi virtual, *cloud computing*, *big data*, kecerdasan buatan, dan *Internet of Things (IoT)* yang dimanfaatkan untuk merubah cara kerja serta interaksi dengan berbagai individu yang memiliki kepentingan tertentu. Tidak hanya itu, transformasi digital ini mencakup transformasi yang berkaitan dengan budaya kelompok, serta struktur dalam organisasi secara menyeluruh. Sehingga setiap organisasi harus memiliki kesiapan dalam melakukan perubahan untuk menyesuaikan cara berpikir, komunikasi dan cara kerja. Dengan kata lain,

transformasi digital bukan hanya mengadopsi teknologi baru, namun berkaitan pula dengan perubahan paradigma ataupun cara kerja untuk mencapai tujuannya di era digital ini. (Wahidin & Wati, 2024)

e-GOVERNMENT

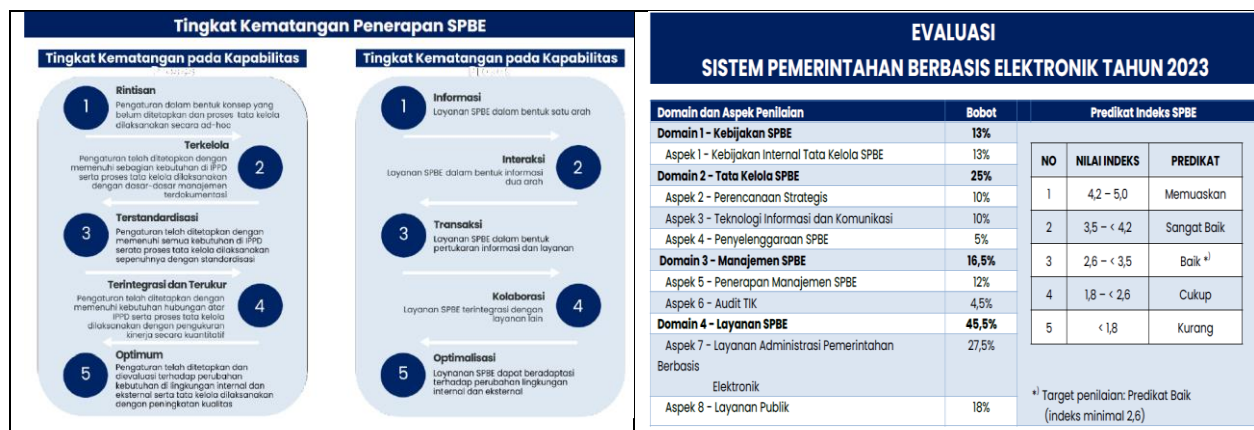
Berbeda dengan definisi e-Commerce maupun e-Business yang cenderung universal, e-Government sering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Bank Dunia mendefinisikan e-Government “*E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government*”. Di sisi lain, UNDP (United Nation Development Programme) dalam suatu kesempatan mendefinisikannya secara lebih sederhana (Indrajit, ebook:15), yaitu “*E-government is the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies.*” (Indrajit, 2005)

Sedangkan menurut INPRES NO. 3 TAHUN 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yaitu ”upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dan dilakukan melalui penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi”.

SPBE

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dikeluarkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman pelaksanaan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah. Berdasarkan Pasal 1 Perpres nomor 95 tahun 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE melaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Domain, Tingkat Kematangan dan Predikat Penilaian adalah sebagai berikut :



Gambar 3
Domain, Tingkat Kematangan dan Predikat Penilaian

METODE PENELITIAN

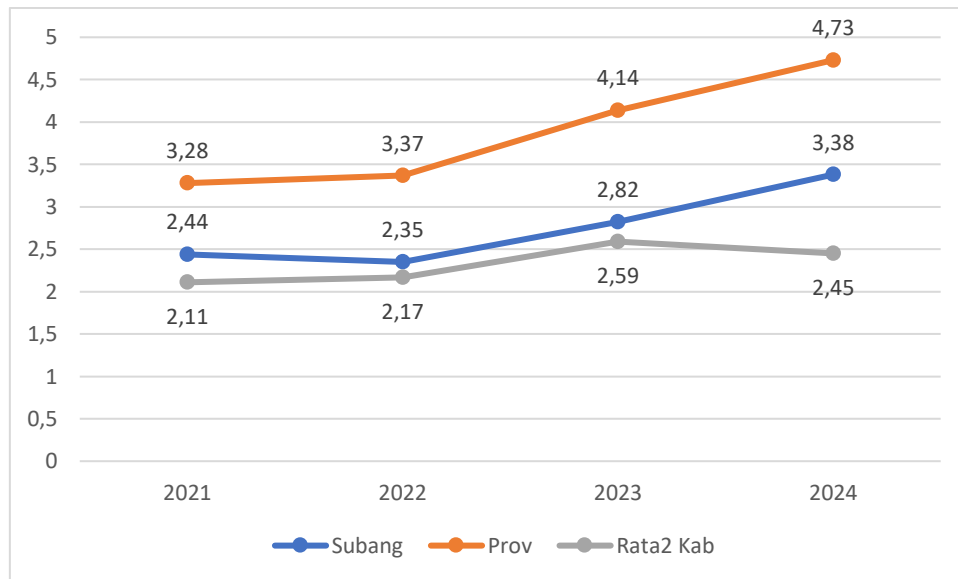
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersumber atau dimulai dengan data dalam pengamatannya sedangkan teori digunakan sebagai bahan penjelas. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis transformasi digital di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dengan menggunakan indikator SPBE sebagai alat ukur. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat kematangan implementasi kematangan SPBE. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi literatur. Teknik ini tidak hanya digunakan sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sumber literatur yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Penelitian didasarkan pada hasil evaluasi SPBE tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. (Kencono et al., 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang mengacu kepada Peraturan Bupati nomor 120 tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan Bupati ini juga merupakan bagian dari implementasi salah satu misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019 – 2023 yaitu Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, terbuka, serta pelayanan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan misi tersebut arah kebijakan yang diambil pemda Kabupaten subang antara lain yaitu memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasiskan teknologi informasi.

Untuk mengetahui keberhasilan implementasi SPBE di Kabupaen Subang pemerintah melalui Kementerian PANRB secara berkala melakukan evaluasi melalui pengukuran Indeks SPBE. Indeks ini menjadi alat ukur tingkat kematangan digital Kabupaten Subang berdasarkan pada 4 domain. Indeks SPBE Kabupaten Subang, Indeks SPBE Provinsi Jawa Barat dan rata-rata

indeks SPBE Kabupaten se Indonesia dari tahun 2021-2024, dapat dilihat pada gambar berikut : (Menpan RB (a), 2021, 2022, 2023, 2024)



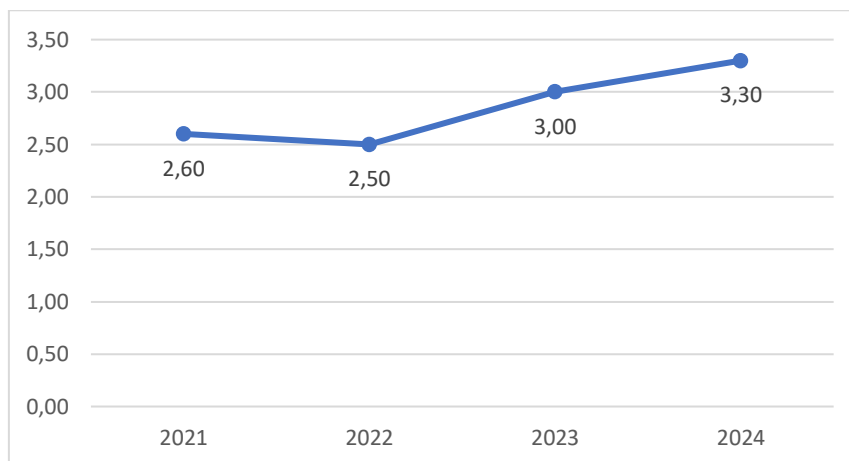
Gambar 4
Indeks SPBE Kabupaten Subang, Provinsi Jabar, Rata-rata Kabupaten
Tahun 2021-2024

Indeks SPBE kabupaten Subang pada tahun 2023 dan 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan tetapi masih jauh dibawah Provinsi Jawa Barat walaupun demikian bila dibandingkan dengan rata-rata kabupaten se Indonesia masih lebih baik. Namun demikian apabila dilihat dari peringkat kabupaten/kota se Jawa Barat Kabupaten Subang selalu berada di peringkat 5 dari bawah.

DOMAIN KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

ASPEK INTRNAL TATA KELOLA SPBE

Pada aspek ini digunakan 10 indikator untuk mengukur tingkat kematangan, Dimana hasil evaluasi dari tahun 2021 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut : (Menpan RB (b), 2021, 2022, 2023, 2024)



Gambar 5
Nilai Aspek Internal Tata Kelola SPBE
Tahun 2021-2024

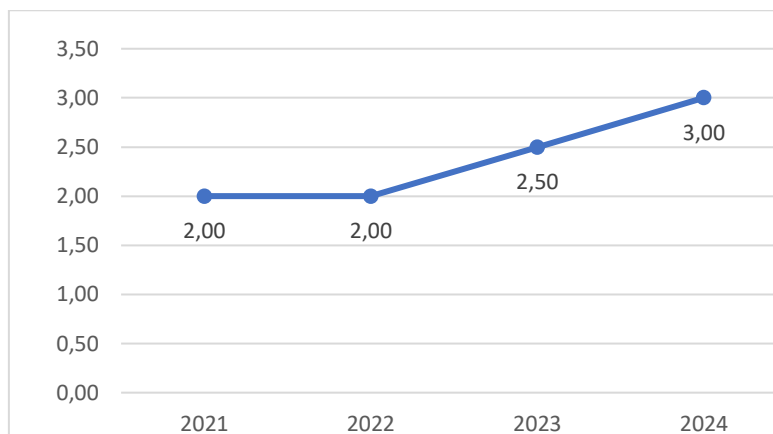
Pada domain Kebijakan Internal hanya mempunyai 1 (satu) aspek dan nilai yang diperoleh pada tahun 2024 masuk dalam tingkat kematangan terstandarisasi. Pemenuhan tingkat kematangan ini diperoleh karena adanya Peraturan Bupati Subang nomor 64 tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Peraturan Bupati Subang nomor 120 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik yang telah memuat seluruh substansi tata kelola SPBE. Di samping itu, telah terdapat pula Peraturan Bupati Subang nomor 320 tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Subang. Untuk menindaklanjuti permasalahan spesifik mengenai manajemen data dan tim Koordinasi SPBE diterbitkan Keputusan Bupati Subang nomor 500.12.6/KEP.389-DISKOMINFO/2024 tentang Tim Koordinasi Sistem Perintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Subang.(Menpan RB (b), 2024)

DOMAIN TATA KELOLA SPBE

Domain Tata Kelola SPBE mempunyai 3 aspek penilaian yaitu Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Penyelenggara SPBE. Pada tahun 2024 domain ini mendapat nilai 3,2 yang berarti berada pada tingkat kematangan **terstadarisasi**.

PERENCANAAN STRATEGIS SPBE

Pada aspek ini digunakan 4 indikator untuk mengukur tingkat kematangan, dimana hasil evaluasi dari tahun 2021 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut :(Menpan RB (b), 2021, 2022, 2023, 2024)

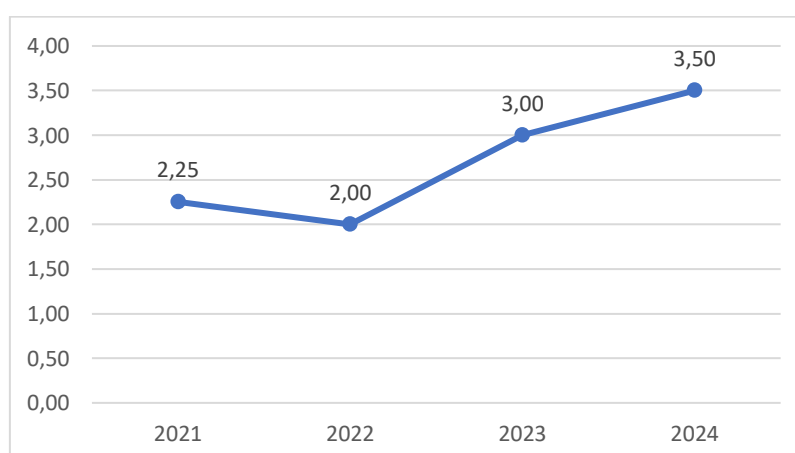


Gambar 6
Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE
Tahun 2021-2024

Hasil evaluasi pada tahun 2024 aspek ini mengalami peningkatan 1 (satu) level tingkat kematangan dibandingkan pada tahun 2023 yaitu dari tingkat kematangan **terkelola** menjadi **terstandarisasi**. Peningkatan ini terjadi karena pada tahun 2024 Kabupaten Subang telah menyusun Arsitektur SPBE Kabupaten Subang yang terdiri dari 3 (tiga) buku yaitu Buku I yang berisi kondisi eksisting Arsitektur SPBE Kabupaten Subang, Buku II berisi target Arsitektur SPBE Kabupaten Subang dan Buku III berisi peta rencana SPBE Kabupaten Subang. Disamping itu Kabupaten Subang juga telah memiliki Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang telah disahkan. (Menpan RB (b), 2024)

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pada aspek ini digunakan 4 indikator untuk mengukur tingkat kematangan, dimana hasil evaluasi dari tahun 2021 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut : (Menpan RB (b), 2021, 2022, 2023, 2024)

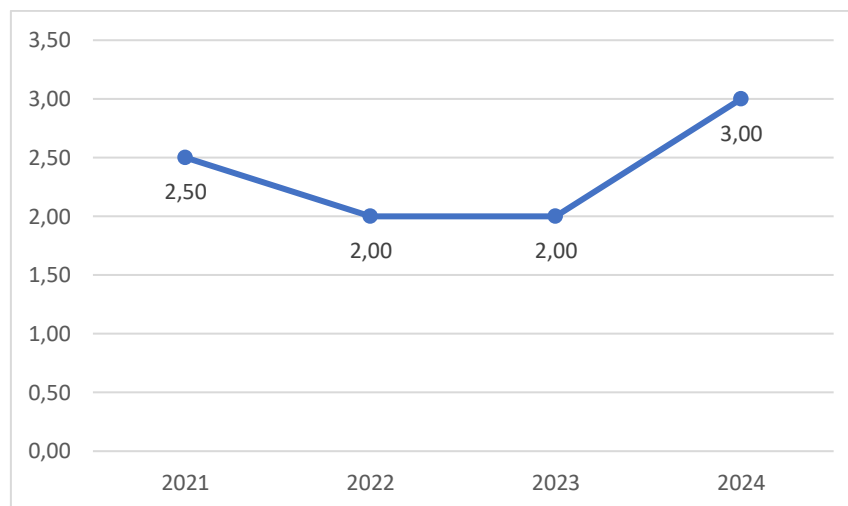


Gambar 7
Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi
Tahun 2021-2024

Aspek ini pada tahun 2024 nilai hasil evaluasinya mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2023 tetapi tingkat kematangan aspek ini tidak mengalami perubahan yaitu **terstandarisasi**. Dalam sepek ini Pemerintah Daerah Kabupaten Subang telah membuat SOP pemabngunan Aplikasi, dokumen pengembangan aplikasi (SIJAWARA dan SIMALI), SOP pengoperasian pusat data, daftar pengguna data center, dokumen *traffic* jaringan intra, dokuemn monitoring Sistem server, pembangunan jaringan intra, SOP penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah dan lain-lain yang mendukung aspek ini.(Menpan RB (b), 2024)

PENYELENGGARAAN SPBE

Pada aspek ini digunakan 2 indikator untuk mengukur tingkat kematangan, dimana hasil evaluasi dari tahun 2021 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut :(Menpan RB (b), 2021, 2022, 2023, 2024)



Gambar 8
Nilai Aspek Penyelenggaraan SPBE
Tahun 2021-2024

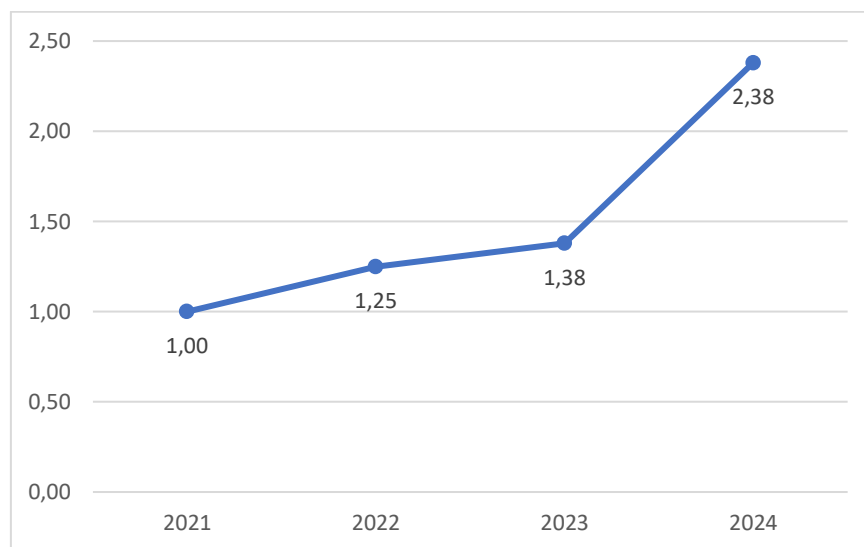
Aspek Penyelenggaraan SPBE pada tahun 2024 nilai hasil evaluasinya mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari 2 menjadi 3 yang berarti tingkat kematangannya mengalami peningkatan 1 (satu) level dibandingkan pada tahun 2023 yaitu dari tingkat kematangan **terkelola** menjadi **terstandarisasi**. Peningkatan ini terjadi karena Pemda Kabupaten Subang telah membuat Keputusan Bupati Subang nomor 500.12.6/KEP.389-DISKOMINFO/2024 tentang Tim Koordinasi Sistem Perintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Subang dan Keputusan Bupati Subang nomor Kl.03.02/KEP.271-DISKOMINFO/2022 tentang Tim Pelaksana Smart City Kabupaten Subang. Disamping itu terdapat beberapa dokumen perjanjian kerja sama dalam rangka penerapan SPBE dengan berbagai pihak antara lain Pemda Provinsi Jawa Barat, PMI Kabupaten Subang, Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, Fakulats Ilmu Komputer Universitas Subang dan Pengadilan Negeri Subang. (Menpan RB (b), 2024)

DOMAIN MANAJEMEN SPBE

Domain Manajemen SPBE mempunyai 2 aspek penilaian yaitu Penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK, dimana hasil evaluasi dari tahun 2021 sampai tahun 2024 belum mendapatkan hasil yang optimal. Hasil evaluasi pada tahun 2024 memang mengalami peningkatan tingkat kematangan 1 (satu) level tetapi baru pada level **Terkelola**.

PENERAPAN MANAJEMEN SPBE

Pada aspek ini digunakan 8 indikator untuk mengukur tingkat kematangan, dimana hasil evaluasi dari tahun 2021 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut : (Menpan RB (b), 2021, 2022, 2023, 2024)

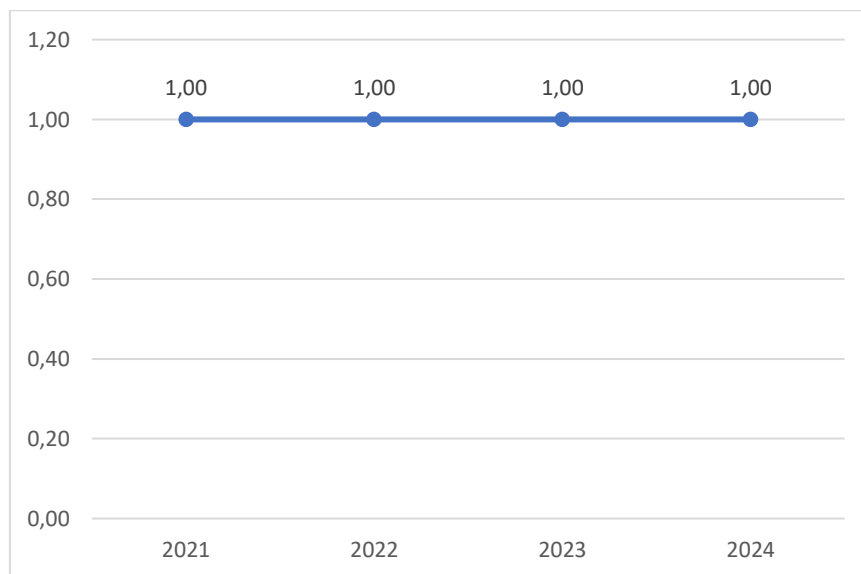


Gambar 9
Nilai Aspek Penerapan Manajemen SPBE
Tahun 2021-2024

Kabupaten Subang pada aspek ini belum menunjukkan implementasi yang baik, hal bisa dilihat dari hasil evaluasi dari tahun 2021 sampai tahun 2024. Aspek ini mengalami peningkatan 1 level Tingkat kematangan pada tahun 2024 yaitu dari level **rintisan** menjadi level **terkelola**. Kenaikan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan Risiko SPBE, Pelaksanaan *Vulnerability Assessment* berkala pada aplikasi, sertifikat penilaian keamanan informasi pada Sistem Elektronik melalui indeks keamanan informasi (indeks KAMI oleh BSSN, Penetapan Tim Tanggap Keamanan Siber Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, penerapan manajemen data berdasarkan SOP dan beberapa kegiatan lain yang mendukung aspek ini. (Menpan RB (b), 2024)

AUDIT TIK

Pada aspek ini digunakan 3 indikator untuk mengukur tingkat kematangan, dimana hasil evaluasi dari tahun 2021 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut : (Menpan RB (b), 2021, 2022, 2023, 2024)



Gambar 10
Nilai Aspek Audit TIK
Tahun 2021-2024

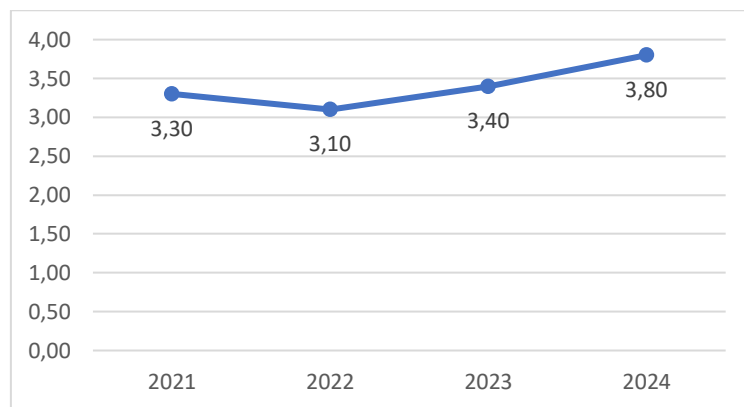
Pada aspek Audit TIK Kabupaten Subang belum melaksanakan audit infrastruktur, audit aplikasi maupun audit keamanan SPBE sehingga dari tahun 2021 sampai tahun 2024 hasil evaluasi tetap pada nilai 1 atau pada tingkat kematangan **rintisan**. (Menpan RB (b), 2024)

DOMAIN LAYANAN SPBE

Pada domain ini memiliki dua aspek yang dinilai yaitu Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Layanan Publik Berbasis Elektronik. Nilai yang didapat pada tahun 2024 sudah sangat baik yaitu 4,01 yang berarti pada tingkat kematangan **kolaborasi**.

LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pada aspek ini digunakan 10 indikator untuk mengukur tingkat kematangan, dimana hasil evaluasi dari tahun 2021 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut :(Menpan RB (b), 2021, 2022, 2023, 2024)

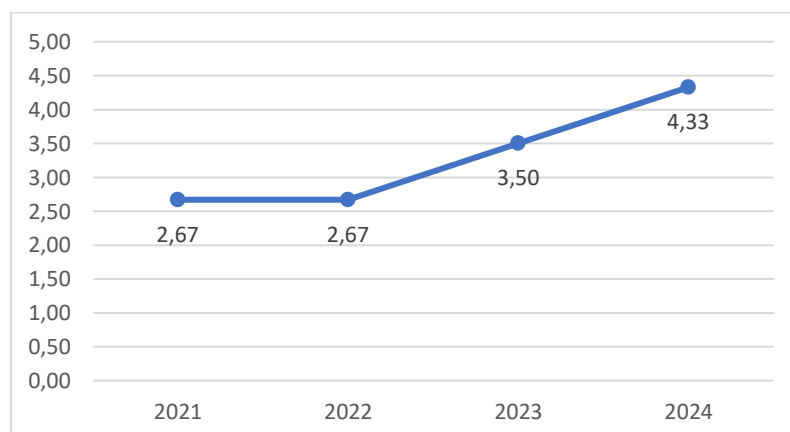


Gambar 11
Nilai Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Tahun 2021-2024

Aspek ini hasil evaluasinya sudah baik dari tahun 2021 sampai tahun 2024 dan mengalami peningkatan nilai walaupun dari sisi Tingkat kematangan belum mengalami peningkatan yaitu **terstandarisasi**. Tingkat kematangan ini dicapai karena Kabupaten Subang telah menggunakan beberapa aplikasi dalam layanan administrasi, antara lain perencanaan, penganggaran dan keuangan dengan aplikasi SIPD, pengadaan barang dan jasa dengan aplikasi SPSE, layanan kepegawaian dengan aplikasi SIMASN, layanan kearsipan dinamis dengan aplikasi SRIKANDI dan aplikasi lain yang mendukung aspek ini. (Menpan RB (b), 2024)

LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

Pada aspek ini digunakan 6 indikator untuk mengukur tingkat kematangan, dimana hasil evaluasi dari tahun 2021 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut : (Menpan RB (b), 2021, 2022, 2023, 2024)



Gambar 12
Nilai Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik
Tahun 2021-2024

Aspek ini berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024 merupakan aspek yang mempunyai nilai tertinggi Kabupaten subang dengan tingkat kematangan **kolaborasi**. Beberapa layanan yang

menjadikan capaian nilai 4,33 yaitu Aplikasi SP4N LAPOR sebagai layanan pengaduan layanan public, Aplikasi Open Data sebagai layanan data terbuka, Aplikasi SIABAH JAWARA sebagai layanan public pengadministrasian proposal bantuan sosial, dan aplikasi SINANAS sebagai layanan publik terkait perijinan.(Menpan RB (b), 2024)

SIMPULAN

Transformasi digital pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang telah berjalan baik hal ini bisa dilihat dari Hasil Evaluasi SPBE dengan nilai **3,38** dengan predikat **BAIK**. Hasil evaluasi 8 aspek yang menjadi ukuran dalam evaluasi SPBE adalah :

1. Tingkat kematangan level 4, 1 aspek yaitu Layanan Publik Berbasis Elektronik,
2. Tingkat kematangan level 3, 5 aspek yaitu Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE, dan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3. Tingkat kematangan level 2, 1 aspek yaitu Penerapan Manajemen SPBE.
4. Tingkat kematangan level 1, 1 aspek yaitu Audit TIK

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, S., Nurhayati, S., Ismail, A., & yakub. (2024). *Transformasi Digital Panduan Praktis Manajemen Berbasis Teknologi* (I). PT Media Penerbit Indonesia.
- Arifin, Z. (2017). *Adopsi Teknologi Untuk Keunggulan Daya Saing* (I). PT. PLN (Persero).
- Indrajit, R. E. (2005). *Electronic Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. eBook.
- Kencono, B. D., Putri, H. H., & Handoko, T. W. (2024). Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 7.
- Menpan RB (a). (2021). *Keputusan Menpan RB No. 503 Tahun 2021 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2021*.
- Menpan RB (a). (2022). *Keputusan Menpan RB No. 108 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2022*.
- Menpan RB (a). (2023). *Keputusan Menpan RB No. 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2023*.
- Menpan RB (a). (2024). *Keputusan Menpan RB No. 663 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2024*.
- Menpan RB (b). (2021). *Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Subang tahun 2021*.
- Menpan RB (b). (2022). *Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Subang tahun 2022*.
- Menpan RB (b). (2023). *Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Subang tahun 2023*.

- Menpan RB (b). (2024). *Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Subang tahun 2024*.
- Prawira, M. G., Panjaitan, A. C. D., & Paranity, A. P. (2023). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintah Kabupaten Tabanan. *Raad Kertha*, 6.
- Wahidin, D., & Wati, I. (2024). Peluang Dan Tantangan Transformasi Digital Di Indonesia. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNP Kediri*.